



Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Nurul Dieniah Alfath¹, Puti Andiny², Yani Rizal³, Safuridar³

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Samudra, Langsa – Aceh, Indonesia

E-mail : nuruldieniah09@gmail.com¹, putiandiny@unsam.ac.id²,

yanirizal@unsam.ac.id³, safuridar@unsam.ac.id⁴

Abstract. *This research aims to analyze the influence of social assistance spending and subsidy spending on poverty in North Sumatra Province. The independent variables in this research include social assistance spending and subsidy spending, while the dependent variable is poverty. The data used comes from the North Sumatra Central Statistics Agency for the 2009-2023 period, which includes data on social assistance spending, subsidy spending and the depth of poverty. The data analysis method used is multiple linear regression. The results of this research show that social assistance spending has a positive but not significant influence on poverty, while subsidy spending has a positive and significant influence on poverty. Government spending policies in the form of subsidies and social assistance still require evaluation to increase their effectiveness in reducing poverty.*

Keywords: *Social Assistance Spending, Subsidy Spending, Poverty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial dan belanja subsidi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi belanja bantuan sosial dan belanja subsidi, sementara variabel terikatnya adalah kemiskinan. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara selama periode 2009-2023, yang mencakup data belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan kedalaman kemiskinan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Belanja subsidi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. kebijakan belanja pemerintah dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial masih memerlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan.

Kata Kunci: Belanja bantuan sosial, belanja subsidi, kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang layak dan bermartabat (Badan Pusat Statistik, 2011). Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah telah mengalokasikan berbagai belanja seperti belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi. belanja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2022, angka kemiskinan tercatat sebesar 8,42% (Panggabean, 2023). kemudian pada tahun 2023 sebesar 8,15 %. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, tantangan untuk mengentaskan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pemerintah Sumatera Utara.

Belanja pemerintah adalah salah satu cara penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan (Anderson et al., 2018).

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan untuk mengurangi dampak kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Di Sumatera Utara, berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah berjalan efektif meskipun masih terdapat Beberapa aspek program ini masih memerlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas yang optimal. Di antaranya adalah pendamping program yang belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan baik, tingkat kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pertemuan kelompok yang rendah, serta berbagai permasalahan teknis seperti saldo nol, kartu yang rusak atau hilang tanpa adanya penggantian. Selain itu, perilaku dan persepsi KPM terhadap bantuan pemerintah juga menunjukkan adanya pemahaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program. (Bangun, 2019). Misfaruddin et al., (2024) menyatakan bahwa daerah dengan belanja sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tetapi hubungan ini dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana secara efisien.

Selain belanja bantuan sosial, belanja subsidi juga digunakan untuk penurunan angka kemiskinan. Belanja subsidi memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, dengan asumsi bahwa kenaikan belanja subsidi akan mengurangi angka kemiskinan (Kristinawati et al., 2018). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, menyebutkan bahwa “Pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata (TNPK2, 2022). kebijakan subsidi dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Subsidi ini membantu mengurangi beban belanja rumah tangga miskin, terutama dalam hal bahan bakar dan listrik (Kemenkeu Republik Indonesia, 2022). berikut Tabel 1 menyajikan data mengenai realisasi belanja sosial (bansos), belanja subsidi, dan tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009 hingga 2023 :

Tabel 1. Realisasi Belanja Bansos, dan Subsidi, Kedalaman kemiskinan di Sumatera Utara

Tahun	Kedalaman kemiskinan (%)	Realisasi Belanja	
		Bansos	Subsidi
2009	1,92	Rp 224.763.768	Rp 11.946.757
2010	2,04	Rp 248.557.486	Rp 7.527.050

2011	1,85	Rp 242.452.525	Rp 14.252.361
2012	1,46	Rp 135.892.309	Rp 5.510.708
2013	1,58	Rp 180.399.077	Rp 1.499.960
2014	1,69	Rp 170.402.391	Rp 14.831.507
2015	1,6	Rp 113.014.303	Rp 2.963.662
2016	1,77	Rp 82.895.474	Rp 4.125.797
2017	1,71	Rp 126.747.434	Rp 4.678.732
2018	1,56	Rp 126.213.599	Rp 3.863.144
2019	1,37	Rp 182.225.182	Rp 2.972.714
2020	1,51	Rp 124.763.467	Rp 1.258.534
2021	1,52	Rp 22.454.580	Rp 4.799.700
2022	1,37	Rp 35.342.973	Rp 3.576.509
2023	1,26	Rp 75.422.206	Rp 2.687.500

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2009 - 2023

Berdasarkan tabel 1 Selama periode 2009 hingga 2023, kedalaman kemiskinan menunjukkan fluktuatif, namun cenderung menurun. pada tahun 2009, kedalaman kemiskinan berada di angka 1,92% dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 dengan angka 1,26%. penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat miskin, meskipun terdapat beberapa tahun dimana angka ini mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2010 yaitu 2,04% dan 2016 yaitu 1,77%.

Realisasi belanja bansos menunjukkan variasi yang signifikan selama periode ini. pada tahun 2009, realisasi belanja bansos tercatat sebesar Rp. 224.763.768 dan mengalami puncaknya pada tahun 2010 dengan Rp. 248.557.486,-. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran pemerintah daerah.

Realisasi belanja subsidi juga mengalami fluktuasi. pada tahun 2009, belanja subsidi yang direalisasikan sebesar Rp.11.946.757 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2013 menjadi Rp.1.499.960,-. namun belanja subsidi kembali meningkat pada tahun – tahun berikutnya, meskipun tidak mencapai angka yang signifikan seperti pada tahun – tahun awal. pada tahun 2023, subsidi tercatat sebesar Rp.2.687.500. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui realisasi belanja bansos dan subsidi, hasilnya bervariasi dari tahun ke tahun. fluktuasi dalam realisasi belanja bansos dan subsidi adanya tantangan dalam konsistensi kebijakan dan implementasi program - program pemerintah daerah. untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**pengaruh belanja bantuan sosial dan subsidi terhadap kemiskinan di sumatera utara**”

2. LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Presiden Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 (Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem., (2022), menekankan pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas. Menurut Mankiw, dalam Zaqiah et al., (2023) kemiskinan merupakan pendapatan keluarganya berada dibawah satu tingkat mutlak yang disebut dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain kemiskinan adalah persentase masyarakat yang pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Merupakan tingkatan mutlak pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah federal untuk setiap ukuran keluarga dibawah tingkat dimana suatu keluarga dinyatakan miskin. Garis kemiskinan disesuaikan setiap tahunnya terhadap nilai perubahan pada tingkat harga-harga dan bergantung pada ukuran keluarga.

Menurut teori *Vicious Circle of Poverty* yang dikemukakan oleh Nurkse, kemiskinan terjadi karena keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada tingkat produktivitas manusia. Apabila mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini akan menyebabkan kelangkaan keterampilan teknis, pengetahuan, serta jiwa kewirausahaan. Akibatnya, sumber daya alam yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, terabaikan, atau bahkan disalahgunakan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya alam juga menjadi penyebab kemiskinan, mengingat sumber daya alam merupakan elemen utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, kemiskinan manusia dan kemiskinan sumber daya alam saling memengaruhi, menjadi sebab sekaligus akibat satu sama lain (Jhingan, 2016)

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Dharmakarja, 2017). Bantuan sosial diberikan oleh pemerintah

dalam bentuk barang, jasa dan uang untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari potensi resiko sosial serta untuk meningkatkan taraf hidup mereka.(Alamanda, 2020)

Perluasan bantuan sosial yang terus bergulir sampai saat ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan (Fadhli & Nazila, 2023).

Hubungan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan

Bantuan sosial memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Nurainah, (2019) mengungkapkan Belanja bantuan sosial memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan angka kemiskinan, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Bantuan sosial dirancang sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan meningkatkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan pokok, belanja bantuan sosial membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga miskin.

Belanja Subsidi

Subsidi merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal pemerintah, yang secara rutin mengalokasikan anggaran negara untuk program subsidi. Anggaran subsidi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Selain itu, kebijakan subsidi juga tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan subsidi dengan cermat, mengingat peran subsidi dalam mendukung pemerataan pembangunan. Namun, subsidi dapat menjadi beban jika alokasinya semakin besar tetapi manfaatnya tidak optimal (Carolina, 2022).

Menurut Spencer & Amos Jr dalam Soen et al., 2022, belanja subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik kepada perusahaan maupun rumah tangga, dengan tujuan tertentu untuk membantu meringankan beban pihak penerima.

Hubungan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan

Subsidi, khususnya pada sektor energi dan pangan, berkontribusi terhadap stabilitas harga yang dapat meringankan beban masyarakat miskin. Taufikurrahman et al., (2023) menyatakan bahwa kebijakan subsidi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dampak dari kebijakan subsidi mampu menjaga masyarakat untuk tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga pendapatan yang terbatas dapat

dialokasikan untuk kebutuhan lain yang juga penting, seperti pendidikan dan kesehatan. kemudian subsidi juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dampak belanja pemerintah, seperti bantuan sosial, dan subsidi, terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara, yang diukur menggunakan indikator kedalaman kemiskinan. Sementara itu, variabel independennya adalah jumlah belanja pemerintah untuk bantuan sosial, dan subsidi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk periode 2009 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bantuan sosial dan Subsidi berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun model regresi linier berganda yang digunakan yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Pengentasan Kemiskinan

A : Konstanta

X₁ : Belanja Bantuan Sosial

X₂ : Belanja Subsidi

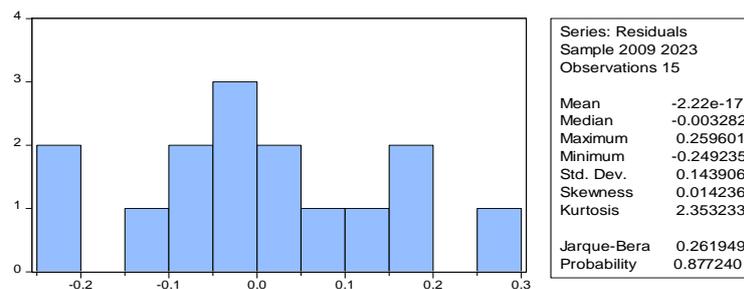
e : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data, dengan menggunakan *softwer eviews 12*. Adapun hasil pengolahan data serta analisisnya yaitu sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber : Hasil olah eviews 12

Dari uji Normalitas tersebut diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.261949 dan *probability* sebesar 0,877240 dimana $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa distribusi residual pada data ini terdistribusi normal.

Uji multikolinieritas

Tabel 1 Uji multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	10.20029	5805.152	NA
LOG(BANSOS)	0.008644	1701.200	2.151121
LOG(SUBSIDI)	0.000378	48.08259	1.092874

Sumber : Hasil olah eviews 12

Dari hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel bansos, dan subsidi yaitu dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam model tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.004101	Prob. F(9,5)	0.5285
Obs*R-squared	9.656943	Prob. Chi-Square(9)	0.3790
Scaled explained SS	3.513865	Prob. Chi-Square(9)	0.9404

Sumber : Hasil Olah eviews 12

Dari hasil Uji heteroskedastisitas nilai *p-value* pada *probability C-Square* sebesar 0.3790 lebih besar dari 0,05. sehingga dinyatakan tidak mengalami masalah *heteroskedastisitas*.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.322957	Prob. F(2,9)	0.3136
Obs*R-squared	3.407952	Prob. Chi-Square(2)	0.1820

Sumber : Hasil Olah data eviews 12

Dari Uji Autokorelasi dengan nilai *prob chi square* yang merupakan nilai p-value uji *Breusch-Godfrey serial correlation LM*, yaitu sebesar 0.1820 lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada masalah Autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.761127	3.193790	-0.238315	0.8160
LOG(BANSOS)	0.142670	0.092976	1.534485	0.1532
LOG(SUBSIDI)	0.404360	0.019450	2.280719	0.0435
R-squared	0.562155	Mean dependent var		1.614000
Adjusted R-squared	0.442743	S.D. dependent var		0.217479
F-statistic	4.707689	Durbin-Watson stat		1.370384
Prob(F-statistic)	0.023818			

Sumber : diolah dengan *eviews 12*

Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Hasil Estimasi diketahui bahwa :

Probabilitas > dari 0.05 ($\alpha = 5\%$), sehingga Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap kemiskinan secara parsial.

Probabilitas < dari 0.05, yang berarti bahwa belanja subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara parsial.

b. Uji F (Simultan)

Nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0.023818 lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa secara simultan belanja pemerintah untuk bantuan sosial, dan subsidi bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R²)

Diketahui Nilai R² sebesar 0.562155 menunjukkan bahwa sekitar 56,21% variasi dalam kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel-variabel independen, yaitu belanja pemerintah untuk bantuan sosial, dan subsidi. Sisa nya 43,79 % variasi dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan

Belanja bantuan sosial Memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan *probability* 0.1532 > 0,05 terhadap kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0.142670. Koefisien sebesar 0,142670 menunjukkan bahwa setiap peningkatan bantuan sosial sebesar satu rupiah

akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,142670 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Bantuan sosial pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh penetapan sasaran yang kurang tepat, birokrasi yang rumit, tergerusnya manfaat bantuan, dan ketergantungan masyarakat, sehingga hanya mampu memberikan solusi jangka pendek untuk kemiskinan (Salsabila et al., 2024).

Pengaruh belanja subsidi terhadap kemiskinan

Belanja subsidi memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan *probability* $0.0435 < 0,05$ terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.404360. Koefisien sebesar 0,404360 menunjukkan bahwa setiap peningkatan belanja subsidi sebesar satu rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,404360 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hasil tersebut menyatakan bahwa subsidi yang disalurkan dapat membantu masyarakat miskin secara langsung, misalnya melalui pengurangan biaya kebutuhan dasar. Studi oleh (Nurhayati, 2018) menunjukkan bahwa subsidi energi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, dan Subsidi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan variabel independen (belanja bansos dan subsidi) memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel terikat (kemiskinan) di Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial dan subsidi mampu menjelaskan perubahan pada kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Islami Sari & Marissa, (2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial, subsidi, dan hibah terhadap kemiskinan dari tahun 2009 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan:

1. **Belanja bantuan sosial** memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
2. **Belanja subsidi** berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi, baik domestik maupun asing, menjadi pendorong penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali mekanisme bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, sederhana, dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Selain itu, efektivitas belanja subsidi sebagai alat pengentasan kemiskinan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dengan memastikan subsidi diarahkan pada kebutuhan dasar yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Dalam

jangka panjang, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan subsidi, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda. (2020). The effect of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. *Info Artha*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does government spending affect income poverty? A meta-regression analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Badan Pusat Statistik. (2011). Penjelasan data kemiskinan. *In Press Release BPS*. http://www.bps.go.id/brs_file/Penjelasan_Data_Kemiskinan.pdf
- Bangun, H. (2019). Efektivitas program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Medan Johor. *Universitas Sumatera Utara*.
- Carolina, M. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang subsidi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan. *Jurnal Budget - Pusat Kajian Anggaran*, 7.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. 1, 374–389.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh implementasi bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 346–359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu Republik Indonesia. (2022). Pengalihan subsidi BBM untuk lindungi masyarakat miskin dan rentan miskin. *Kementerian Keuangan RI*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pengalihan-Subsidi-BBM>
- Kristinawati, A., Sarfiah, S. N., Destiningsih, R., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2018). 1440-4087-1-Pb. 2.
- Misfaruddin, Simbolon, R. L., Switamy, G. M. B., Manurung, B. L., Lubis, M. F., Siregar, A. S., & Asrizal, S. N. (2024). Kemiskinan di Sumatera Utara menggunakan regresi panel influencing factors of poverty in Sumatera Utara. 3(2), 39–60.
- Nurainah. (2019). Analisis pengaruh kesempatan kerja, belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 2(1), 63.
<https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1155>

Panggabean, A. L. (2023). Pemprov Sumut turunkan angka kemiskinan melalui program Mapro. *Antarasumut*. <https://sumut.antaranews.com/berita/552885/pemprov-sumut-tekan-kemiskinan-melalui-program-mapro?page=all>

Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (2022).

Rizal Taufikurrahman, M., Ahmad, T., Wibowo, D., Holis, A., & Mirdad, A. J. (2023). Dampak subsidi BBM dan LPG 3 Kg terhadap kemiskinan nelayan. *Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)*. <https://indef.or.id/publikasi/dampak-subsidi-bbm-dan-lpg-3-kg-terhadap-kemiskinan-nelayan/#:~:text=Secara%20nasional%2C%20dampak%20kebijakan%20subsidi,subsidi%20langsung%20berdasarkan%20harga%20keekonomian>.

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
<https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>

Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92.
<https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>

TNPK2. (2022). GEDSI perspective in energy policy for poverty in Indonesia. <https://www.tnp2k.go.id/articles/gedsi-perspective-in-energy-policy-for-poverty-in-indonesia>

Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(3), 33. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284>